

# **REPRODUKSI STRUKTUR DALAM ORGANISASI NELAYAN PONGGAWA-SAWI DALAM EKSPLOITASI SUMBERDAYA LAUT DI SULAWESI SELATAN**

*Dra. Nurlinah, M.Si*

Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan Fisip UNHAS

## **Pendahuluan**

Potensi sumberdaya pesisir dan lautan yang ada di Daerah Sulawesi Selatan, selain menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan yang hidup di wilayah pesisir, dapat pula menjadi wadah ekonomi bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomiannya. Untuk memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dan lautan berupa biotik liar maupun biotik tak liar, masyarakat nelayan harus mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan mengatasi rintangan-rintangan alam yang ganas, serta bagaimana merekayasa sarana/ prasarana teknologi eksploitasi dalam rangka memanfaatkan sumberdaya biota laut yang bernilai tinggi.

Di sebahagian besar kawasan pantai tersebut bermukim penduduk nelayan dan pelayar yang dengan berbagai unsur kebudayaannya yang khas, dan mereka digolongkan sebagai kominiti-kominiti maritim. Karakteristik kemaritimannya dapat didefinisikan terutama pada model pengelolaan mata pencaharian. Kegiatan ekonomi ini terpusat pada sektor perikanan laut, sistem pengetahuan, teknologi dan

organisasi sosial yang terpusat pada pemanfaatan sumber daya laut.

Nelayan dalam usaha ekonomi perikanan lautnya diarahkan secara spesialis dan profesional, faktor modal (*capital*) dan hubungan kerjasama (*relation of production*) merupakan faktor-faktor produksi yang paling menentukan hidup matinya atau maju mendeknya sebuah usaha perikanan laut, apakah usaha perikanan tersebut berskala besar yang modern atau berskala kecil yang tradisional (Bavick, 1984). Kondisi laut yang berbahaya dan kondisi sumberdaya hayati laut yang tak mudah dikelola menyebabkan pekerjaan menangkap ikan di laut penuh resiko bahaya mengenai keselamatan jiwa manusia, dan ketidakmenentuan dalam pendapatan nelayan (Acheson, 1981). Kedua resiko bahaya dan ketidakmenentuan (*risk and uncertainty*) merupakan karakteristik laut berkenaan dengan kehidupan dan ekonomi komuniti nelayan. Karakteristik laut yang demikian menjadi kondisi pasif yang menyebabkan diperlukannya secara mutlak pengelolaan modal yang berkesinambungan dan mantap, sedangkan proses-proses kerja yang

rumit dan teknologi perikanan yang berat bersama dengan karakteristik laut tersebut menjadi kondisi aktif atau faktor yang menyebabkan diperlukannya secara mutlak aspek kerjasama dan hubungan-hubungan produksi, yang bukan hanya didasarkan pada aspek kekuatan fisik, pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus dijiwai oleh rasa solidaritas, moral, dan tanggung jawab para anggota (*crew*).

Dalam sektor ekonomi perikanan laut pada umumnya dari dahulu sampai sekarang diterapkan sistem bagi hasil, jadi bukan sistem upah atau gaji (Acheson 1981). Dalam sistem ini ditetapkan bahwa yang dibagi adalah hasil tangkapan, dengan demikian besar kecilnya bagian setiap anggota tergantung pada kondisi tangkapan ikan. Setiap unsur dari alat produksi dipersonifikasikan sebagai tenaga kerja yang mendapat bagian lebih besar daripada tenaga kerja nelayan yang sesungguhnya. Bagian-bagian alat-alat produksi pada akhirnya lari pada pemilikinya sendiri.

Sebagaimana halnya kelompok-kelompok masyarakat nelayan Bugis-Makassar pada umumnya, maka dalam pengelolaan modal usaha perikanan laut, nelayan secara mutlak melibatkan pihak-pihak lain, seperti teman, kerabat, orang sekampung, atau pedagang besar yang berkedudukan di kota sebagai pemberi pinjaman modal awal atau modal secara berkelanjutan. Unsur-unsur modal yang diusahakan

antara lain uang, perahu, mesin, alat tangkap, dan lain-lain. Untuk mengembalikan pinjaman modal biasanya ditempuh melalui penjualan hasil tangkapan nelayan kepada pemberi pinjaman modal yang lebih banyak berlangsung secara terus-menerus.

Pola hubungan kerja ini mengakar dan melembaga pada masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan istilah "*pongawa-sawi*". Sistem ini meliputi relasi dalam hubungan pekerjaan yang dikembangkan oleh dua pihak atau lebih, di mana satu pihak yang lebih mampu terutama dari segi keuangan/permodalan bertindak sebagai *pongawa* (bos), sedangkan yang lainnya adalah *sawi* (anak buah). Jadi hubungan ini menyerupai sistem *patron-client*. Adanya ketidaksetaraan dalam sistem bagi hasil dalam organisasi *pongawa-sawi* seringkali dipandang, pada satu sisi, sebagai sumber kemelaratan bagi nelayan *sawi*. Meskipun demikian, pada sisi yang lain, organisasi ini seringkali dianggap pula sebagai salah satu tumpuan para *sawi* yang paling handal jika mereka menghadapi masa-masa paceklik. Ini bisa terjadi karena *pongawa* adalah alamat yang tepat untuk mencari pinjaman dalam situasi yang sulit. Dengan potret seperti itu, maka kelembagaan sosial mungkin perlu diberdayakan kearah lebih positif (memihak nelayan kecil) (Sallatang 1982).

Dalam perspektif kekuasaan, hubungan kerja *ponggawa-sawi* akan dilihat dinamika strukturalnya dan keputusan-keputusan yang menentukan bentuk-bentuk perilaku nelayan dalam organisasi kerja tersebut. Berdasarkan pada adanya peranan setiap individu atau komponen dalam pembuatan keputusan/ pilihan tindakan, maka setiap anggota kelompok *ponggawa-sawi* perlu dianalisis keputusan-keputusannya dan dijelaskan bagaimana keputusan-keputusan seperti itu mempengaruhi/menentukan perilaku aktual nelayan di laut. Pengambilan keputusan, dalam lembaga *ponggawa-sawi* merupakan proses Bergeraknya kekuasaan dalam organisasi tersebut. Dalam konteks eksploitasi sumberdaya laut oleh nelayan, organisasi *ponggawa-sawi* dilihat sebagai *contested representation*, dimana kekuasaan adalah suatu yang beredar (bergerak) sehingga terjadi reproduksi struktural. Posisi-posisi struktural adalah produk sementara yang dapat berubah sesuai definisi situasi (Bourdieu 1977). Posisi struktural ini akan diuralkan dalam proses pengambilan keputusan sehubungan dengan pemanfaatan sumberdaya laut oleh nelayan dalam organisasi *ponggawa-sawi*.

#### ***Ponggawa-sawi* dan Reproduksi Strukturalnya**

Di Sulawesi Selatan pada umumnya dikenal kelompok kerjasama nelayan disebut *Ponggawa-sawi* yang sudah

bertahan sejak puluhan bahkan ratusan tahun silam. *Ponggawa* (disebut juga *punggawa* atau *pinggawa*) berarti pemimpin yang sekaligus berstatus pemilik usaha penangkapan ikan, sedangkan *sawi* berarti anak buah/anggota atau pengikut. Dalam usaha perikanan terdapat dua tingkatan *ponggawa*, yaitu *ponggawa laut* dan *ponggawa darat* atau *ponggawa pulau*. Yang pertama berarti pemimpin pelayaran dan kegiatan penangkapan ikan, yang kedua berarti pemilik sekaligus pengelola (*manager*) usaha perikanan. Selain dalam konteks usaha kerjasama perikanan, *ponggawa* juga diacukan kepada seseorang yang usahanya jual beli alat-alat produksi perikanan (kapal/perahu, mesin, alat-alat tangkap) kepada nelayan, yang pada umumnya dengan sistem kredit. *ponggawa* dalam pengertian ini pula biasanya memberi pinjaman uang untuk biaya-biaya operasional nelayan di laut. Kategori *ponggawa* ini adalah sama dengan pedagang atau rentenir, yang di Jawa dikenal juga sebagai *Juragan*. Di mana-mana di desa-desa nelayan pesisir dan pulau-pulau di Indonesia mereka itu dikategorikan sebagai orang-orang kaya.

Sistem rekrut *sawi* didasarkan terutama pada hubungan-hubungan kekerabatan, demikianlah muncul kelompok-kelompok *ponggawa-sawi* yang pada umumnya terdiri dari orang-orang sekeluarga atau sekerabat. Adapun pengetahuan dan keterampilan

kerja diperoleh para *sawi* dan pengetahuan serta keterampilan pengelolaan usaha yang dikuasai oleh *pongawa*, semuanya bersifat informal yang diperoleh melalui pewarisan atau pengalaman secara langsung.

Di masa lalu, seorang *pongawa* biasanya hanya memiliki dan menguasai sebuah perahu dengan perangkat-perangkat alat tangkap sederhana. Lagipula perahu dan alat tangkap serta berbagai barang perlengkapan kebanyakan dibuat sendiri oleh para *pongawa* kalau bukan oleh tukang-tukang lokal yang merangkap sebagai nelayan juga. Akses pada kepemilikan dan penguasaan alat-alat produksi pada waktu itu memang masih mudah bagi seorang *pongawa* karena ditunjang oleh barang-barang material yang masih serba mudah diperoleh dan dengan pengelolaan sederhana memungkinkan seseorang *pongawa* bisa merangkap berbagai kegiatan, terutama ikut aktif bersama para *sawinya* di laut.

Suatu reproduksi struktur berarti ketika suatu usaha perikanan mengalami perkembangan dalam peningkatan jumlah unit perahu dan perangkat-perangkat sarana produksi yang digunakan, yang berarti pula terjadi peningkatan jumlah *sawi-sawi* yang dilibatkan dalam proses kerja. Dalam kondisi demikian tugas-tugas mulai menjadi lebih rumit dan berat sehingga menuntut pembagian status dan peranan lebih jelas untuk menangani aktivitas atau urusan-urusan tersebut.

Demikianlah muncul status-status *pongawa darat* atau *pongawa lombo* yaitu pihak pemimpin atau pengelola usaha-usaha yang dimilikinya dengan fungsi-fungsi: mempersiapkan atau mengadakan alat-alat produksi, memberikan bimbingan atau pengarahan kepada kelompok-kelompok kerja nelayan, mengurus pengolahan tangkapan, pemasaran dan lain-lain. Oleh karena tugas-tugas mulai menjadi rumit, maka *pongawa darat* harus merekrut dari *sawi* orang-orang berpengalaman dan berbakat untuk menjadi *pongawa laut/juragan* yang bertugas memimpin pelayaran, mengarahkan, mengawasi dan membuat keputusan-keputusan berkenaan dengan pelayaran dan kerja di laut. Dalam perkembangan seperti ini, *pongawa laut/juragan* pada umumnya tidak lagi sebagai pemilik melainkan semata sebagai pemimpin atau pengawas kerja, yang oleh sebab itu nama yang lebih cocok dan banyak digunakan dalam komuniti-komuniti nelayan pulau-pulau adalah *pongawa caddi* (pemimpin kecil). Dalam kondisi perkembangan jumlah unit-unit usaha seperti ini, berarti seorang *pongawa lombo/pongawa darat* dapat merekrut dan membawahi dua, tiga atau empat *pongawa caddi/juragan* yang masing-masing memimpin dua, tiga atau lebih *sawi* untuk usaha-usaha pancing, sedangkan untuk usaha-usaha jaring, bagang dan usaha-usaha teripang diperlukan minimal 4 orang *sawi*. Oleh karena

anggota keluarga *pongawa lombo* dan juragan sudah tidak mencukupi lagi untuk dikerahkan, maka sebagian sawi direkrut dari anggota kerabat dan orang-orang sekampung/sedesa, sementara *pongawa caddi/juragan* masih selalu diusahakan dari kalangan keluarga atau kerabat *pongawa lombo*. Dalam hubungan seperti ini para *pongawa caddi* juga berfungsi sebagai wakil dari *pongawa lombo* meskipun dia lebih dekat dengan kelompok-kelompok sawi sebagai nelayan aktual yang sehari-harinya aktif di laut.

Antar anggota kelompok dalam proses perkembangan yang demikian terbentuk suatu hubungan rumit dan unik yang oleh para peneliti dikenal sebagai hubungan *pongawa-sawi*. Hubungan ini bukan hanya didasarkan pada kontrak kerjasama, pembagian tugas dan aturan bagi hasil, tetapi juga mencirikan hubungan kerjasama antara orang-orang sekeluarga/sekerabat yang mencirikan hubungan *patront-client*. Ciri hubungan kerjasama di antara orang-orang sekerabat ditunjukkan dengan banyaknya unit-unit usaha/perahu yang dimiliki dan diawaki oleh orang-orang sekeluarga/sekerabat. Para *sawi* dan juragan bukan hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis melalui proses enkulturasi dan sosialisasi dari orangtua sebagai pengelola yang merencanakan, mengatur, dan mengontrol jalannya usaha, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai dan sikap-sikap tanggungjawab,

perasaan memiliki usaha, ketaatan, loyalitas kekerabatan, kekompakan, kerukunan kelompok, dan lain-lain.

Pola hubungan *patront-client* dalam kelompok kerja nelayan terbentuk dengan bertemunya dua pihak pemanfaat sumberdaya laut utama dengan status yang tidak sama: *pongawa* sebagai pemilik/pengusaha atau pengontrol alat-alat produksi dan juragan bersama sawi-sawinya yang tidak mempunyai sesuatu nilai kecuali tenaga kerja dengan keterampilan teknis dan pengetahuan (tentang biota laut, musim, kondisi cuaca, kondisi pisik laut, keyakinan, praktek religi dan magis sebagai mekanisme pemecahan masalah). Tujuan utama para nelayan aktual (*juragan* dan *sawi-sawi*) ialah perolehan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dan sosialnya, sedangkan bagi pihak *pongawa*/pemilik usaha disamping untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan sosial, mereka juga berusaha menutupi biaya-biaya operasional dan kalau memungkinkan untuk memperbaharui atau menambah alat-alat produksi baru. Tujuan atau cita-cita kedua belah pihak dapat dicapai dan dipertahankan dengan menjalin hubungan fungsional yang kuat dan langgeng di mana pengusaha berusaha memberikan pelayanan sosial dan ekonomi secukupnya sesuai dengan tingkat-tingkat kebutuhan para nelayan, sebaliknya nelayan menunjukkan sikap ketekunan kerja, ketaatan, kejujuran,

kesetiaan, atau pengakuan nama baik *pongawa*.

Jika membandingkan beratnya pekerjaan, jumlah pendapatan, kondisi kehidupan sosial ekonomi antara keluarga-keluarga sawi dengan *pongawa* selama ini, memang terdapat sedikit atau banyak perbedaan di antara keduanya. Sebelum motorisasi, aturan bagi hasil menggariskan: 2 bagian untuk perahu, 2-2,5 bagian untuk alat tangkap yang kesemuanya jatuh di tangan *pongawa* darat sebagai pemilik/pengelola usaha. Kemudian setiap *sawi* memperoleh 1 bagian dan juragan mendapat 1,5-2 bagian. Jika pemilik merangkap sebagai juragan berarti dia memperoleh 1 bagian sebagai ganti jasanya ikut ke laut. Ada juga sistem bagi hasil yang mendapatkan: 50% untuk *pongawa* dan 50% lainnya untuk nelayan (termasuk juragan) setelah biaya-biaya operasional.

Gejala reproduksi struktural paling menyolok dalam komuniti-komuniti nelayan di Sulawesi Selatan terjadi sebagai konsekuensi dari adopsi motorisasi perahu-perahu dan sarana-sarana perikanan penting lainnya. Fenomena perubahan meliputi aspek-aspek (1) berkurangnya akses nelayan pada pemilikan dan kontrol alat-alat produksi, (2) terbentuknya struktur kerjasama bos/pengusaha besar (dari kota) dengan kelompok-kelompok nelayan kecil dan nelayan perorangan, (3) berubahnya sistem bagi hasil, (3) meluasnya jaringan/sumber

perolehan biaya operasional dan biaya-biaya hidup bagi keluarga-keluarga nelayan, (4) meluasnya jaringan pemasaran, dan (5) menghilangnya peranan wanita dalam aktivitas proses pengolahan hasil-hasil laut. Reproduksi struktural kelembagaan *pongawa-sawi* digambarkan di atas pada pokoknya, merupakan gerak kekuasaan dalam kelembagaan *pongawa-sawi* mengarah kepada praktek/perilaku eksploitasi sumberdaya laut, yang pada gilirannya membawa dampak berarti bagi perubahan kondisi-kondisi sumberdaya dan lingkungan habitat laut, khususnya habitat terumbu karang dalam wilayah perairan sekitarnya. Berikut akan diuraikan bagaimana kekuasaan struktur yang diproduksi sementara dalam organisasi *pongawa-sawi* dalam usaha eksploitasi sumberdaya laut.

#### **Kekuasaan *Pongawa Laut/Juragan* Menentukan Perilaku *Sawi***

Komponen paling inti/elementer dalam kelompok kerja masyarakat bahari Bugis dan Makassar (termasuk Bajo), khususnya komuniti-komuniti nelayan pesisir dan pulau-pulau di Sulawesi Selatan, ialah *pongawa laut/juragan* dan *sawi/anak* buahnya. Meskipun struktur kelompok ini tidak dicirikan dengan adanya pembagian kerja secara ketat, namun secara adat masing-masing *pongawa laut/juragan* dan *sawi* mempunyai perangkat-perangkat tugas tertentu yang harus diperankannya,

sementara beberapa tugas lainnya bisa dilakukan secara bersama-sama.

Salah satu peranan terpenting dari *ponggawa laut/juragan* ialah pengambilan keputusan berkaitan aktivitas pelayaran dan produksi/penangkapan ikan. Menyangkut aktivitas pelayaran, secara detail keputusan-keputusan dibuat oleh *ponggawa laut/juragan* ialah penentuan jadwal pelayaran berangkat dan kembali, lokasi-lokasi yang dituju, dan rute-rute dilakui, tipe-tipe perahu/kapal dan mesin digunakan. Berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan (proses produksi) di laut, keputusan-keputusan dibuat oleh *ponggawa laut/juragan* ialah menyangkut spesies-spesies yang dicari, penentuan lokasi penangkapan, tipe alat/teknik eksploitasi digunakan, alokasi/jumlah waktu kegiatan, pengaturan kerjasama antar anggota, dan lain-lain. Salah satu keputusan terpenting dibuat oleh *ponggawa laut/juragan* ialah penggantian atau penambahan sarana-sarana pelayaran dan penangkapan ikan yang dilakukan secara musiman atau sporadik karena pertimbangan usia teknik atau produktifnya, bahkan seringkali karena faktor kerusakan atau hilangnya sarana-sarana produksi tersebut di laut. Lagi pula bahwa urusan penggantian atau penambahan komponen-komponen sarana-sarana pelayaran dan perikanan tersebut secara otomatis melibatkan pihak-pihak lain, sekurang-kurangnya dengan *ponggawa darat* sebagai pemilik

usaha dengan siapa para anak buah tidak pernah atau jarang sekali berurusan.

Peranan pembuatan keputusan tersebut tentu saja merupakan konsekuensi logis dari kedudukan para *ponggawa laut/juragan* sebagai pemimpin aktivitas-aktivitas pelayaran dan produksi, pengontrol dan penanggung jawab sarana-sarana produksi dan pelayaran, bahkan seringkali berstatus pemilik alat-alat produksi. Kedudukan mana bisa diakses karena seseorang memiliki banyak pengetahuan kelautan dan keterampilan kerja, bakat pengelolaan dan kepemimpinan, juga mempunyai sikap dan mental keberanian yang sangat penting berkaitan dengan aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan, kewibawaan, kejujuran, loyalitas, pelindung, tanggung jawab, dan lain-lain.

Pada kenyataannya ada banyak keputusan dibuat oleh *ponggawa laut/juragan* dipengaruhi oleh keinginan anggota kelompok di satu sisi, dan sebagai tindak lanjut dari keputusan atau pengaruh dari desakan *ponggawa darat/pemilik usaha* pada sisi lainnya.

#### **Kekuasaan Kelompok Menentukan Perilaku Nelayan**

Meskipun para *sawi* khususnya dan masyarakat pada umumnya secara adat mengakui dan memandang *ponggawa laut/juragan* sebagai pengambil atau pembuat keputusan yang harus diikuti

terutama berkaitan aktivitas pelayaran dan produksi di laut, namun dalam praktek sehari-hari seringkali pendapat atau saran seorang atau beberapa anggota kelompoklah diikuti oleh *pongawa laut/juragan*. Ada dua cara munculnya pengaruh anggota kelompok menjadi suatu keputusan, yaitu dengan diminta oleh *pongawa laut/juragan* dan atau disarankan sendiri oleh seorang atau beberapa orang anak buah kepadanya.

Hal-hal yang seringkali diusulkan, disepakati, kemudian diputuskan bersama anak buah dan juragan ialah mengenai lokasi-lokasi yang dipilih, saat-saat turun ke laut, penentuan alat-alat yang dipakai di antara alat-alat tersedia lainnya.

Nelayan pengguna bahan peledak, nelayan bius, dan penyelam teripang biasa juga menggunakan pendapat-pendapat individu atau kelompok sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam rangka aktivitas di laut. Kelompok-kelompok nelayan pembom yang menyediakan berbagai tipe bom aktivitasnya bergantung kepada kondisi stok, jenis-jenis, dan perilaku ikan, lokasi, cuaca, situasi dan kondisi keamanan oleh pihak berwajib dan lain-lain. Demikian halnya kelompok-kelompok nelayan pengguna bius yang sebelum melakukan kegiatan penangkapan terlebih dahulu memerlukan penentuan lokasi penangkapan, pengamatan akan kondisi ikan di dasar, informasi tentang situasi

keamanan oleh pihak berwajib, dan lain-lain. Banyak di antara perencanaan, kegiatan teknis, dan langkah-langkah strategis tersebut tidak selamanya diambil alih oleh *pongawa laut/juragan*, sebaliknya mereka biasanya meminta pertimbangan kepada seorang atau beberapa orang anak buahnya kalau bukan anak buah sendiri berinisiatif mengajukan usulan-usulan kepadanya, berikut disepakati dan diputuskan bersama untuk dilakukan.

Peranan anak buah sebagai sumber saran atau pendapat yang akan menjadi keputusan-keputusan bersama kelompok terutama terjadi dalam proses-proses kerja/aktivitas eksploitasi di laut. Untuk penentuan sebuah lokasi selamanya didasarkan kepada petunjuk anak buah yang peka melihat tanda-tanda adanya ikan di suatu tempat -- melalui guncangan air laut, adanya burung sedang mengincar mangsa ikan, melihat langsung ikan-ikan di bawah air. Untuk jadinya dilakukan pemboman serta tipe-tipe bom yang cocok digunakan juga didasarkan kepada petunjuk penyelam/pengintai tentang sikap ikan (liar, jinak) dan posisi kelompok-kelompok ikan di laut (dasar, pertengahan, permukaan).

Seperti halnya pada kelompok-kelompok nelayan bom, anak buah pada kelompok-kelompok nelayan bius ("penyelam" dalam istilah lokal) juga memegang peranan penting dalam hal penentuan lokasi penangkapan, arah-arah yang dituju dalam pencarian dan



pengejaran ikan, lamanya pengejaran, teknik serta perilaku pembiusan, dan lain-lain. Peranan seperti ini tentu saja sedikit atau tidak dimainkan oleh juragan yang pada umumnya hanya mengawasi jalannya pekerjaan. Ini logis karena anak buahlah yang mempunyai pengalaman lokasi-lokasi tertentu yang ada ikannya, letak-letak rumah-rumah ikan target (sela-sela, gua-gua batu karang) di taka/terumbu karang dalam, arah-arrah dilalui ikan-ikan ketika meloloskan diri (karang dangkal), tempat-tempat (lubang-lubang batu-batu karang) di mana ikan-ikan bersembunyi pada saat-saat lelah, dan lain-lain. Bilamana di suatu lokasi masih kelihatan adanya beberapa ekor ikan belum tertangkap, nelayan biasanya meminta kepada juragan untuk memperpanjang waktu kerjanya.

#### **Kekuasaan Ponggawa Darat**

##### **Menentukan Perilaku Kelompok Nelayan**

Di luar kelompok inti nelayan (*ponggawa laut/juragan* bersama anak buah/*sawi-sawinya*) ada pihak yang merupakan bagian dari dan lapisan atas dalam kelompok *ponggawa-sawi*, yaitu *ponggawa darat*. Justru *ponggawa darat* yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengelola modal usaha mempunyai berbagai peranan penting, khususnya dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menentukan perilaku kelompok-kelompok nelayan (juragan, anak buah) di laut. Peranan *ponggawa*

*darat* sebagai pembuat keputusan terpenting merupakan aspek praktek/konsekuensi logis dari statusnya sebagai pemilik usaha atau modal perikanan. Terdapat tiga macam pola hubungan nelayan dengan ponggawa darat yang memungkinkan *ponggawa darat* menjadi komponen dan menduduki hirarki atas dalam struktur kelembagaan *ponggawa-sawi*. Pertama, hubungan kerjasama di mana nelayan sebagai anggota yang mengoperasikan alat-alat produksi milik *ponggawa darat* sampai pada waktu tidak ditentukan. Kedua, hubungan kerjasama di mana nelayan sebagai pembeli alat-alat produksi dari ponggawa darat melalui kredit yang dilunasinya melalui cara mengangsur utang. Ketiga, bentuk hubungan kerjasama di mana nelayan melalui *ponggawa laut/juragannya* menyewa alat-alat produksi (perahu, mesin/motor, alat tangkap, alat bantu tangkap) kepada ponggawa darat.

Pada pola pertama, keputusan-keputusan *ponggawa darat* sangat menentukan langkah atau perilaku para ponggawa laut/juragan dan perilaku nelayan di laut. Berbagai keputusan dibuat ponggawa darat yang harus dilakukan atau ditindaklanjuti oleh ponggawa laut/juragan sebagai bawahan ialah menyangkut jenis-jenis komoditi tangkapan, ukuran besar dan volume tangkapan, -- selama ini belum pernah ada pembatasan volume tangkapan disebabkan oleh cenderung merosotnya jumlah tangkapan nelayan -- sarana

tangkap digunakan, seringkali juga tentang waktu dan lokasi penangkapan, tempat penjualan, standar harga, dan lain-lain. Bahkan tentang orang-orang yang direkrut menjadi anak buah/sawi serta penyelesaian berbagai persoalan, termasuk konflik antar anggota, sebagian besar ditentukan oleh *pongawa darat*. Peranan yang cukup banyak dan penting ini dimungkinkan oleh statusnya sebagai pemilik usaha, kesenioran, keahlian dan pengetahuan pengelolaan usaha (*managerial skill/knowledge*), dan pengalaman kerja kenelayanan. *Pongawa darat* pada umumnya memang pada mulanya berasal dari status-status nelayan *sawi*, *pongawa laut/juragan*, yang kemudian meningkat menjadi *pongawa darat*.

Pada pola kedua, keinginan dan maksud *pongawa darat* juga besar pengaruhnya dalam menentukan keputusan-keputusan dibuat *pongawa laut/juragan* dan para anak buahnya. Terkait proses produksi dan hubungan-hubungan ekonomi, secara garis besar ada empat hal banyak ditentukan oleh *pongawa darat*, yakni pengembalian pinjaman (melalui angsuran), spesis tangkapan diusahakan, penjualan/pemasaran, dan penentuan tingkat harga. Mengenai spesis tangkapan biasanya menjadi kewenangan *pongawa darat* - ini biasanya merupakan tindak lanjut dari keinginan Bos - tetapi seringkali juga menjadi keputusan *pongawa laut/juragan* bersama *sawi-sawinya* sendiri.

Keputusan dalam hal perolehan modal yang pada umumnya dilakukan oleh *pongawa darat* (pemilik usaha dan pengelola modal) tentu dalam konteks kerjasamanya dengan para nelayan (*pongawa laut/juragan* dan *sawi-sawi*) sebagai yang terlibat secara langsung dalam pengoperasian sarana-sarana produksi/modal. Bentuk keputusan dalam hubungan-hubungan sosial ekonomi seperti ini berbeda dengan yang mencirikan struktur hubungan kerjasama antara *pongawa darat* (sebagai pengusaha modal) dengan nelayan melalui hubungan sewa alat-alat produksi (perahu, mesin, alat-alat tangkap).

Aturan dan pengembalian utang atau pinjaman pada umumnya dilakukan dalam bagi hasil, yaitu dengan pemotongan sebagian dari hasil diperuntukkan bagi nelayan. Mekanisme-mekanisme pemberian kredit, pengembalian utang, penjualan tangkapan, dan bagi hasil, pada umumnya saling terkait dan diatur dalam aturan baku/aturan adat yang sudah bertahan sejak lama, yang rupanya lebih banyak ditentukan oleh *pongawa darat* daripada pihak nelayan. Terdapat dua indikasi utama yang menunjukkan dominasi *pongawa darat* terhadap nelayan, yaitu ketentuan berupa keharusan penjualan seluruh tangkapan kepada *pongawa darat* dan hak *pongawa darat* tersebut menentukan harga, yang pada umumnya di bawah harga standar -- biasanya

bervariasi dari 5% hingga 15%, bahkan sewaktu-waktu 20%. Bahkan seringkali ponggawa darat mendesakkan keinginannya kepada ponggawa laut/juragan untuk pengangsuran secepatnya utang-utang yang selama ini dinilainya menunggak atau tidak lancar penyetorannya. Dengan dominasi tersebut, *ponggawa darat* sewaktu-waktu atau seringkali mengingatkan kepada *ponggawa laut/juragan* untuk mengintensifkan aktivitas penangkapannya.

Pada pola ketiga, pengaruh *ponggawa darat* terhadap pembuatan keputusan juragan dan sawi-sawinya sangat terbatas. Hal-hal menjadi ketentuan dan yang mempengaruhi keputusan nelayan hanya sebatas desakan pembayaran sewa yang jumlahnya berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bilamana dari awal atau sewaktu-waktu ada kesepakatan dalam hal penjualan tangkapan kepada pemilik alat-alat produksi/usaha, apalagi bilamana pihak penyewa mengusahakan pinjaman biaya-biaya operasional kepada pemilik tersebut, maka dari situlah mulai tumbuh pengaruh dominasinya terhadap pihak nelayan, yang bisa memperkuat posisi *ponggawa darat* sebagai pembuat berbagai keputusan penting yang menguntungkan baginya.

Hal menjadi prinsip dan menguatkan motivasi dan menjadi pedoman perilaku nelayan pada umumnya, bahwa aktivitas produksi

(menangkap ikan dengan menggunakan sarana produksi berupa perahu/kapal, alat tangkap, sarana pengawetan, biaya-biaya operasional, dan lain-lain) akan atau niscaya mendatangkan hasil yang diorientasikan pada fungsi pemenuhan kebutuhan hidup (*subsistent*) dan keuntungan (*benefit*) bagi sebagian dalam pengembangan usaha ekonominya. Itulah sebabnya setiap individu atau kelompok kerjasama nelayan, sebagai peminjam atau penyewa sarana produksi (perahu, alat-alat tangkap) dari para ponggawa darat, mereka tetap komitmen untuk bekerja dengan sungguh-sungguh di laut dengan mengoperasikan sarana tangkap milik ponggawanya, dikredit, dan atau disewa dari pengusaha lokal.

#### **Kekuasaan Bos Menentukan Keputusan Ponggawa Darat dan Perilaku Nelayan**

Ponggawa darat yang berkedudukan di pulau-pulau merupakan aktor-aktor ekonomi top lokal, namun sistem sosial/hubungan-hubungan ekonomi dan kedudukan sosial ekonominya sama sekali tidak otonom. Sebaliknya, keberlangsungan hidup usaha mereka ini tergantung kepada kekuatan modal para pengusaha besar dari luar yang pada umumnya berkedudukan di Makassar. Meskipun mereka itu pada umumnya berkedudukan di luar pulau/desa-desa nelayan, bukan pula kerabat, bahkan mereka dari etnik lain (kebanyakan keturunan Tionghoa), namun dalam hubungan-hubungan produksi, terutama

berkaitan pengelolaan modal dan pemasaran hasil tangkapan tingkat regional, sejak dahulu kala mereka telah diperhitungkan sebagai Bos. Ini menunjukkan relatif tepat dan menjadi logis menempatkan para Bos pada posisi teratas dalam struktur jaringan kerjasama nelayan. Tentu saja ada sebagian kelompok nelayan relatif otonom dari campurtangan pengusaha-pengusaha besar dari kota tersebut. Mereka itu ialah para pengguna pancing, bubu, dan pukot tradisional, yang tidak memerlukan modal besar, yang menjual tangkapannya kepada pedagang lokal dan daerah saja.

Sejak abad ke-17 (jaman kolonial) menurut catatan sejarah (lihat antara lain Macknight, 1976), Makassar memang sudah menjadi pusat kedudukan para pengusaha besar hasil-hasil laut (teripang, kerang, penyu, sirip hiu, agar-agar, sarang burung walet) yang memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil/pongawa di desa-desa pesisir dan pulau-pulau dalam rangka pengembangan usahanya. Sebagai konsekuensinya bahwa para pongawa darat/pengusaha lokal seperti ini harus tunduk pada berbagai aturan usaha kerjasama yang lebih banyak ditetapkan oleh para pengusaha besar di kota Makassar, yang lebih dikenal dengan sebutan 'Bos'. Keputusan-keputusan dan perilaku pengelolaan dari para *pongawa darat* yang selanjutnya menentukan perilaku nelayan, hingga

sekarang ternyata memang selalu dalam konteks pengaruh keinginan para pengusaha besar atau 'Bos' yang memberikan bantuan modal kepada nelayan melalui pengelolaan para *pongawa darat* di pulau masing-masing.

Sebetulnya dalam sejarah perkembangan perikanan lokal ada juga sebagian pongawa pulau relatif otonom dari kekuatan eksternal, yang hubungan-hubungan eksternalnya relatif terbatas pada hubungan-hubungan pemasaran yang kurang mengikat. Mereka itu ialah para *pongawa rumpon, pongawa bagang, pongawa jaring, pongawa pancing*, dan sebagainya. Sebagian modal mereka dikembangkan sendiri dan sebagian lainnya bersumber/dipinjam dari kerabat, teman, dan pongawa pulau lainnya. Mereka itu biasanya relatif bebas memasarkan tangkapannya kepada pedagang lokal atau daerah, dan di pasar atau TPI lokal. Mereka ini mengusahakan ikan-ikan segar dan berbagai spesies laut lainnya dengan menggunakan berbagai sarana/alat tangkap tradisional.

Adalah menjadi kenyataan bahwa para pengusaha besar komoditi ekspor hasil laut di kota Makassar yang sejak dahulu kala memberi sokongan modal dan akses pemasaran kepada nelayan pesisir dan pulau-pulau, yang menempatkan pihak-pihak luar ini pada posisi dominan menentukan bagi pengambilan keputusan dan pilihan-pilihan perilaku para *pongawa* dan kelompok-kelompok nelayan tersebut.

Dominasi dan kontrol oleh para Bos sebetulnya bukan merupakan suatu pemaksaan, sebab dominasi dan kontrol tersebut memang sudah merupakan ketentuan adat, yang sejak dahulu kala ditaati oleh setiap ponggawa darat/pengusaha lokal yang mau menjalin hubungan kerja dengan para pengusaha besar/Bos (keturunan Cina) di Makassar. Aturan-aturan perkreditan tradisional tersebut dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh para pengusaha besar di Makassar. Seperti halnya ponggawa darat terhadap nelayan, para Bos sebagai pihak pemberi kredit secara otomatis menjadi atasan dan menentukan berbagai hal, termasuk jenis-jenis komoditi diusahakan, alat tangkap digunakan, ke mana tangkapan dipasarkan, dalam kondisi/bentuk bagaimana (segar, hidup, kering) tangkapan dipasarkan, dan penetapan standar atau tingkatan harga setiap jenis tangkapan. Memang nelayanlah yang mempunyai sistem pengetahuan dan mempraktekkan pengetahuannya melalui variasi teknologi dan perilaku eksploitasi, namun situasi dan kondisi permintaan dan harga (banyak dipengaruhi oleh dominasi/kekuatan para pedagang besar) yang menentukan unsur-unsur pengetahuan dan teknologi serta perilaku-perilaku mana dipraktekkan dalam periode waktu tertentu, di suatu tempat tertentu, dan oleh kelompok-kelompok nelayan tertentu pula.

Di tingkat kelompok-kelompok nelayan yang bersentuhan secara langsung dengan sumberdaya dan lingkungan laut, *ponggawa darat*/pengusaha lokal yang menangani hasil-hasil laut di pulau-pulau, dan para bos yang membeli hasil-hasil laut dari ponggawa/pedagang lokal dan nelayan secara langsung akhir-akhir ini -- terutama sejak paruh kedua dekade 1990-an -- telah tumbuh kesadaran dan pemahaman yang berbeda-beda tentang kondisi sumberdaya dan lingkungan laut. Salah satu pandangan dominan ialah yang memahami sumberdaya dan lingkungan laut dalam kondisi berkurang dan degradasi mutu.

## PENUTUP

Organisasi *ponggawa-sawi* dalam masyarakat nelayan Sulawesi Selatan merupakan organisasi *patron-client* dalam rangka eksploitasi sumberdaya laut. Dalam organisasi terdapat individu-individu sebagai aktor dengan status dan peran masing. *Ponggawa* sebagai pemilik modal dan *sawi* sebagai penyedia tenaga kerja. Secara struktur dalam organisasi, posisi *sawi* merupakan anak buah dari *ponggawa*.

Dalam prakteknya, pada organisasi *ponggawa-sawi* terjadi reproduksi struktur yang berlangsung terus menerus sesuai dengan kondisinya. Kekuasaan berlangsung terus menerus dan berpindah sesuai dengan arena berlangsungnya aktifitas. Status Bos--

pongawa darat—pongawa laut—sawi pada situasi tertentu dapat memiliki kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini dilihat sebagai kekuasaan yang bergerak dan membentuk struktur dalam organisasi ini.

#### REFERENCES

- Acheson, J.M 1981 *Anthropology of Fishing*. Annual Review Anthropology Inc. No. 10: 275-316.
- Bavinck, M. 1984 *Small Fry : The Economics of Petty Fishermen in Northern Sri Lanka*. Amsterdam : Free University Press.
- Bourdieu, Pierre, 1977, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge University Press, Cambridge
- Foucault, Michael, 1980, *Power/Knowledge; Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, Pantheon Books, New York
- Lampe, Munsir, Darmawan Salman, dan Ansar Arifin. 1996/1997. "Studi Analisa Sosial - COREMAP Propinsi Sulawesi Selatan". *Laporan penelitian*. Universitas Hasanuddin -PPT-LIPI. Jakarta. Proyek Dibiayai Bank Dunia.
- \_\_\_\_\_. 1997/1998. "Studi Analisa Sosial - COREMAP Propinsi Sulawesi Selatan". *Laporan penelitian*. Universitas Hasanuddin - PPT - LIPI. Jakarta, Proyek dibiayai oleh Bank Dunia.
- McCay, Bonnie J. 1978. "System Ecology, People Ecology, and the Anthropology of Fishing Communities". *Human Ecology*. Vol. 6, No. 4 : 397-422.
- Macknight, C.C. 1976. *The Voyage to Marege ; Macassan Trepangers in Northern Australia*. Melbourne University Press, Melbourne.
- Mubyarto dan Lukman Sutrisno. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai* . PT. Radjawali, Jakarta.
- Sallatang, Arifin 1982. *Pinggawa-Sawi: Suatu Studi Kelompok Kecil*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang
- Semedi, Pujo, 2003 *Close To The Stone, Far From The Throne (The Story of a Javanese Fishing Community. 1820s-1990s)*, Benang Merah, Yogyakarta